

Judul : Rasio Sarjana S2 rendah, pendidikan nasional tidak jelas arahnya
Tanggal : Jumat, 19 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Rasio Sarjana S2 Rendah Pendidikan Nasional Tidak Jelas Arahnya



Abdul Fikri

WAKIL Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyatakan tidak kaget melihat rasio sarjana S2 dan S3 di Indonesia sangat rendah, bahkan dibanding dengan negara tetangga. Karena memang, desain besar pendidikan tinggi kita belum jelas arahnya.

Ia melanjutkan, sebenarnya sejak lama Komisi X DPR meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim membuat desain besar pendidikan Indonesia. "Mau dibawa ke mana arahnya (pendidikan)? Ke vokasi kah atau ke akademik, atau ke profesi?" ujar Fikri.

Dia bilang, kalau bicaranya sarjana berarti arahnya akademik. "Nah kalau akademik, berarti nanti itu sarjana dan tidak cukup hanya sarjana tergantung orientasinya mau ke mana. Kalau ke vokasi kan bukan sarjana," Imbuh Fikri.

Terkait pernyataan presiden RI yang menyayangkan rendahnya rasio sarjana S2 dan S3 di Indonesia, Fikri meminta tanggapan serius dari Kemendikbudristek, terutama pendidikan tinggi. Apalagi, anggaran pendidikan pada tahun 2024 telah naik sebesar Rp17 triliun.

Meski demikian, perlu diperhatikan, apakah anggaran itu dialokasikan seluruhnya untuk pendidikan tinggi atau tidak.

"Sekali lagi, sentilan ini yang menurut saya mungkin agak terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak disadari segera. Karena 2024 dan selanjutnya akan ganti kepemimpinan dan kita harus membangun dari SDM," ucap politisi PKS ini.

Diketahui, Presiden Jokowi menyebutkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di angka 0,45 persen. Adapun negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia, sudah di angka 2,43 persen, sedangkan pada negara maju 9,8 persen.

"Ini jauh sekali. Saya minggu ini rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis. Karena ini kejauhan sekali," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo menyebutkan upaya untuk menyusul rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 ini membutuhkan anggaran di tengah tekanan berat fiskal negara. Terlebih, SDM bisa menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan akan menjadi kunci. Oleh karena itu, dirinya meminta agar pembiayaan pendidikan dan riset harus terus diupayakan seoptimal mungkin.

Untuk riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang kebutuhan riset guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. ■ KAL